

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aktivitas dari sebuah organisasi pasti akan berubah dan berkembang seiring dengan perubahan di lingkungan internal dan eksternalnya. Salah satu hasil dari perubahan aktivitas tersebut adalah risiko. Risiko akan terjadi apabila ada kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, misalnya tujuan dan misi dari organisasi tidak akan tercapai. Kegagalan tercapainya tujuan dan misi bagi organisasi publik dapat mengakibatkan *distrust* (ketidakpercayaan) dari publik atas pelayanan yang diberikan (Ampri, 2006).

Kegagalan risiko dapat dihindari dengan melakukan manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat digunakan sebagai dasar penentuan peta risiko, dampak, dan sikap yang harus diambil (Lajilli dan Daniel, 2005).

Kerangka manajemen risiko melibatkan beberapa proses, diantaranya adalah: (1) manajemen risiko merupakan identifikasi kehati-hatian dan penilaian atas risiko yang akan dihadapi, (2) perumusan model atau strategi untuk menangkal risiko, dan (3) monitoring dan pemeriksaan menyangkut segala tindakan dan model yang dilakukan. Manajemen risiko menurut Ampri (2006) dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas yang dimiliki organisasi.

Perkembangan manajemen risiko sektor publik di Indonesia memang belum seperti pada sektor privat, tetapi pemerintah sudah melangkah ke arah tersebut (Ampri, 2006). Wacana tentang manajemen risiko mulai muncul sejak manajemen risiko dijadikan sebagai salah satu program utama dari strategi dan kebijakan Departemen Keuangan yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No. 464/KMK.01/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen Keuangan (*Road-map* Departemen Keuangan) tahun 2005-2009 yang berisi tentang penerapan manajemen risiko pada lingkup Kemenkeu.

Keputusan menteri keuangan tersebut didukung dengan terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Keputusan tersebut salah satunya berisi tentang kewajiban melakukan manajemen risiko serta item-item manajemen risiko yang perlu untuk dilakukan.

Meskipun peraturan tentang kewajiban melakukan manajemen risiko telah dilakukan, jika tidak diungkapkan tidak akan berguna bagi *stakeholder*, informasi manajemen risiko harus selalu dikomunikasikan dengan beberapa elemen, yaitu internal dan eksternal (Lajilli dan Daniel, 2005). Pada sektor publik elemen tersebut meliputi seluruh pengguna laporan keuangan sektor publik.

Manajemen risiko yang diungkapkan oleh manajemen bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen dalam mengatasi risiko. Bagi pengguna laporan

keuangan pengungkapan *risk management disclosure* dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang dilakukan tepat guna atau tidak, sehingga informasi yang dimiliki oleh *stakeholder* menjadi lengkap. Kelengkapan informasi sangat penting bagi *stakeholder*. Informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan keputusan yang diambil menjadi bias, karena tidak sesuai dengan keadaan organisasi yang sebenarnya.

Pengguna *risk management disclosure* pada organisasi sektor publik lebih terbatas dibandingkan dengan organisasi sektor privat. Pada sektor privat seluruh *stakeholder* mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan *risk management disclosure*, sedangkan pada sektor publik pada saat ini pengguna *risk management disclosure* masih terbatas pada beberapa *stakeholder*, semisal kreditur. Perbedaan penggunaan laporan keuangan lebih didasarkan pada karakteristik organisasi yang berbeda antara sektor publik dan privat (Yunanto, 2010).

Penelitian tentang *risk management disclosure* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi penting untuk dilakukan, karena dapat digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk menilai pentingnya *risk management disclosure*, serta bagi *stakeholder* dapat menjadi salah satu perhatian tentang kondisi pemerintah pada saat pelaporan keuangan. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran, umur, pendapatan asli daerah, perbedaan fungsional, kemandirian dan *leverage* (Yudawijaya, 2010).

Penelitian ini memilih objek pemerintah daerah, karena semakin besarnya tuntutan dari *stakeholder* mengenai kepastian risiko yang ditanggung oleh *stakeholder* pada sektor publik utamanya pemerintah daerah. Berdasar uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO SE-JAWA TENGAH”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang dan judul penelitian, maka perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah?
2. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah?
4. Apakah perbedaan fungsional pemerintah daerah berpengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah?
5. Apakah kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah?
6. Apakah *leverage* pemerintah daerah berpengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
2. Menguji apakah umur pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
3. Menguji apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
4. Menguji apakah perbedaan fungsional pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
5. Menguji apakah kemandirian pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.
6. Menguji apakah *leverage* pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *risk management disclosure* pada pemerintah daerah di Jawa Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut.

##### 1. Implikasi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian sejenis di bidang sektor publik terkait *risk management disclosure*.

##### 2. Implikasi praktis

- a. Bagi pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi risiko yang dihadapi oleh daerahnya serta dapat mempertimbangkan untuk mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menghadapi risiko daerahnya.
- b. Bagi *stakeholder* dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk menilai kebijakan-kebijakan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan risiko pemerintah daerah tersebut. Selain itu diharapkan *risk management disclosure* digunakan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dan pemberian gambaran kepada pembaca tentang permasalahan yang diuraikan dari bab pertama sampai bab terakhir. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

## BAB I PENDAHULUAN

Yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang definisi operasional penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

## BAB IV ANALISIS DATA

Berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian.

## BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran tentang penelitian.